

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Strategi Kepala Sekolah.

1. Pengertian Strategi.

Istilah strategi pada mulanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *strategos*, yang merujuk pada seni seorang pemimpin dalam mengatur pasukan untuk mencapai kemenangan. Konsep tersebut kemudian berkembang jauh melampaui konteks militer dan diterapkan di berbagai bidang, termasuk pendidikan, sebagai cara suatu organisasi merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi langkah-langkah untuk mencapai tujuannya.

Fred R. David (2020) mendefinisikan strategi sebagai sarana untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui serangkaian keputusan dan tindakan yang mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan organisasi. Sejalan dengan itu, Sungkowo, Adilla, dan Saproni (2024) menjelaskan bahwa manajemen strategi kepala sekolah mencakup analisis lingkungan (SWOT), perencanaan strategi berdasarkan kondisi internal-eksternal sekolah, pengorganisasian, implementasi, hingga evaluasi berkelanjutan agar mutu pendidikan tercapai secara optimal. Pendapat serupa dikemukakan oleh Ardheila Setya, Nugraha, Sutopo, dan Anif (2024), yang menyatakan bahwa strategi manajemen kepala sekolah di sekolah dasar merupakan langkah sistematis dalam mengelola sumber daya sekolah, yang keberhasilannya bergantung pada kemampuan kepala sekolah membaca kebutuhan sekolah dan mengembangkan tenaga pendidik.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, strategi dapat dipahami sebagai serangkaian rencana, keputusan, dan tindakan yang disusun secara sistematis melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, konsep strategi menjadi landasan untuk memahami bagaimana kepala sekolah merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai kebijakan dalam mengimplementasikan Program Sekolah Ramah Anak agar tujuan program tercapai sesuai kebutuhan peserta didik dan kondisi sekolah.

2. Peran Kepala Sekolah

Sesuai Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021, kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan, sehingga memiliki dua tanggung jawab utama, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran (*instructional leader*) sekaligus pengelola organisasi. Mulyasa (2022) merangkum peran tersebut ke dalam tujuh fungsi yang dikenal sebagai EMASLIM, yaitu kepala sekolah sebagai educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator. Ketujuh peran ini saling melengkapi dan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA), karena program tersebut tidak hanya menyangkut penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga perubahan budaya sekolah, pola interaksi guru dan peserta didik, kebijakan perlindungan anak, serta kerja sama dengan orang tua dan masyarakat.

Kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang luas dalam menggerakkan seluruh sumber daya pendidikan agar tujuan sekolah dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, kepala sekolah dipahami sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan strategis dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai kebijakan yang mendukung implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SDN 1 Pasangrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang.

a. Kepala Sekolah sebagai *Educator*

Sebagai seorang *educator*, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kualitas pembelajaran serta meningkatkan kompetensi seluruh tenaga pendidik di sekolah. Peran ini menunjukkan bahwa kepala sekolah bukan hanya berfungsi sebagai pengelola administrasi pendidikan, tetapi juga sebagai pemimpin pembelajaran (*instructional leader*) yang berupaya memastikan bahwa seluruh proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, bermakna, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik. Menurut Mulyasa (2022), kepala sekolah sebagai *educator* bertugas membina guru agar mampu melaksanakan pembelajaran secara profesional melalui pemberian arahan,

pendampingan, pelatihan, serta berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim akademik yang mendorong guru terus meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan peserta didik.

Peran kepala sekolah sebagai *educator* juga tercermin dalam kemampuannya membangun budaya belajar di lingkungan sekolah. Kepala sekolah harus menjadi teladan dalam menumbuhkan semangat belajar, kedisiplinan, tanggung jawab, serta nilai-nilai karakter yang menjadi bagian penting dari tujuan pendidikan nasional. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan pengembangan profesional guru, diskusi ilmiah, pelatihan, lokakarya, maupun supervisi akademik yang bertujuan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Selain itu, kepala sekolah juga perlu memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sehingga kompetensi profesional mereka terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.

Dalam kaitannya dengan implementasi Program Sekolah Ramah Anak, peran kepala sekolah sebagai *educator* memiliki arti yang sangat penting. Kepala sekolah perlu memastikan bahwa seluruh guru memahami konsep pendidikan yang berorientasi pada pemenuhan hak anak, mampu menerapkan pembelajaran yang menghargai perbedaan, serta menghindari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun perlakuan yang merendahkan martabat peserta didik. Kepala sekolah juga harus memberikan pembinaan secara berkelanjutan agar guru mampu menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Dengan demikian, keberhasilan Program Sekolah Ramah Anak tidak hanya ditentukan oleh adanya kebijakan sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas. Peran kepala sekolah sebagai *educator* menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran seluruh tenaga pendidik bahwa

setiap anak memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan.

b. Kepala Sekolah sebagai Manager

Selain sebagai edukator, kepala sekolah juga berperan sebagai manager yang bertanggung jawab mengelola seluruh sumber daya sekolah agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam perspektif manajemen pendidikan, peran manajerial kepala sekolah mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, pengawasan, serta evaluasi terhadap seluruh program sekolah. Melalui kemampuan manajerial yang baik, kepala sekolah dapat memastikan bahwa setiap program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dengan melibatkan seluruh warga sekolah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Sebagai manager, kepala sekolah harus mampu menyusun program kerja berdasarkan kebutuhan nyata sekolah, bukan semata-mata berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan program harus diawali dengan identifikasi permasalahan, analisis kebutuhan, penetapan tujuan, serta penyusunan langkah-langkah strategis yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi sekolah. Setelah program disusun, kepala sekolah bertanggung jawab mengorganisasikan seluruh sumber daya yang tersedia, mulai dari guru, tenaga kependidikan, peserta didik, sarana prasarana, hingga dukungan masyarakat. Kemampuan mengelola berbagai sumber daya tersebut menjadi salah satu indikator penting keberhasilan seorang kepala sekolah dalam menjalankan fungsi manajerialnya.

Dalam implementasi Program Sekolah Ramah Anak, kemampuan kepala sekolah sebagai manager menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program. Kepala sekolah harus mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak ke dalam perencanaan sekolah, menyusun kebijakan yang berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak, mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program, serta

membangun koordinasi dengan guru, komite sekolah, orang tua, dan berbagai pihak terkait. Selain itu, kepala sekolah juga harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh program yang telah dirancang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kemampuan manajerial yang baik, implementasi Program Sekolah Ramah Anak tidak hanya menjadi program administratif, tetapi berkembang menjadi budaya sekolah yang diterapkan secara konsisten oleh seluruh warga sekolah.

c. Kepala Sekolah sebagai Administrator

Selain berperan sebagai pendidik dan manajer, kepala sekolah juga memiliki fungsi sebagai administrator yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi sekolah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Administrasi dalam konteks pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan pencatatan atau penyusunan dokumen, tetapi merupakan serangkaian aktivitas yang mendukung terlaksananya seluruh program pendidikan secara sistematis. Menurut Mulyasa (2022), kepala sekolah sebagai administrator bertugas mengelola administrasi kurikulum, administrasi peserta didik, administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, administrasi keuangan, administrasi sarana dan prasarana, serta administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Melalui pengelolaan administrasi yang baik, kepala sekolah dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan sekolah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mampu mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

Peran administratif kepala sekolah menjadi sangat penting karena setiap program sekolah memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dokumentasi, serta pelaporan yang tertib. Administrasi yang baik akan menghasilkan data yang akurat sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, administrasi yang tidak tertata akan menyulitkan sekolah dalam melakukan evaluasi maupun menyusun program pengembangan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, kepala sekolah harus mampu membangun sistem administrasi yang

transparan, tertib, dan mudah diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, kepala sekolah tidak bekerja sendiri, melainkan mengoordinasikan tenaga administrasi, guru, bendahara, dan berbagai unsur lainnya agar setiap kegiatan sekolah terdokumentasi dengan baik.

Dalam implementasi Program Sekolah Ramah Anak, fungsi administrator memiliki peranan yang tidak kalah penting. Kepala sekolah perlu memastikan bahwa seluruh kebijakan mengenai perlindungan anak terdokumentasi secara jelas, mulai dari penyusunan surat keputusan tim Sekolah Ramah Anak, tata tertib sekolah yang berpihak kepada peserta didik, mekanisme pelaporan apabila terjadi kekerasan atau perundungan, hingga dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Administrasi yang tertata akan memudahkan sekolah dalam melakukan monitoring, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak kepada dinas pendidikan maupun instansi terkait. Dengan demikian, fungsi administrator bukan hanya mendukung tertibnya pengelolaan sekolah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjamin keberlanjutan pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak.

d. Kepala Sekolah sebagai *Supervisor*

Peran berikutnya yang sangat penting adalah kepala sekolah sebagai *supervisor*. Supervisi pendidikan merupakan proses pembinaan yang dilakukan secara terencana untuk membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam paradigma pendidikan modern, supervisi tidak lagi dipahami sebagai kegiatan mencari kesalahan guru, melainkan sebagai upaya memberikan pendampingan profesional agar guru mampu mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan. Kepala sekolah sebagai *supervisor* bertugas mengamati pelaksanaan pembelajaran, memberikan masukan yang bersifat konstruktif, serta membantu guru mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Konsep ini menjadi bagian penting dari fungsi kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Pelaksanaan supervisi yang efektif memerlukan hubungan yang harmonis antara kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah harus mampu menciptakan suasana pembinaan yang bersifat kolaboratif sehingga guru merasa didukung untuk terus berkembang, bukan merasa diawasi secara berlebihan. Kegiatan supervisi dapat dilakukan melalui observasi pembelajaran di kelas, diskusi reflektif, pembinaan individu maupun kelompok, serta tindak lanjut berupa pelatihan atau pendampingan sesuai kebutuhan guru. Melalui proses tersebut, kepala sekolah dapat mengetahui berbagai kelebihan dan kekurangan yang masih dimiliki guru sehingga pembinaan yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran.

Dalam implementasi Program Sekolah Ramah Anak, fungsi supervisi menjadi sangat strategis karena kepala sekolah harus memastikan bahwa seluruh guru benar-benar menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang ramah anak. Supervisi tidak hanya difokuskan pada aspek akademik, tetapi juga pada cara guru berinteraksi dengan peserta didik, penggunaan bahasa yang santun, penerapan disiplin positif, penghargaan terhadap keberagaman, serta upaya mencegah segala bentuk kekerasan maupun perundungan di lingkungan sekolah. Apabila kepala sekolah menemukan praktik pembelajaran yang belum sesuai dengan prinsip Sekolah Ramah Anak, maka pembinaan harus segera dilakukan melalui pendekatan yang edukatif dan profesional. Dengan demikian, supervisi menjadi sarana untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak agar tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari.

e. Kepala Sekolah sebagai *Leader*

Sebagai *leader*, kepala sekolah bertanggung jawab memberikan arah, membangun visi bersama, mengambil keputusan, serta menggerakkan seluruh warga sekolah menuju tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan ini tidak hanya ditunjukkan melalui kewenangan formal yang dimiliki, tetapi juga melalui kemampuan memengaruhi, menginspirasi, serta membangun kepercayaan dari guru,

tenaga kependidikan, peserta didik, maupun masyarakat. Konsep EMASLIM yang dikemukakan oleh Mulyasa (2022) menempatkan fungsi leader sebagai salah satu unsur utama dalam keberhasilan pengelolaan sekolah, di mana kepala sekolah yang memiliki kepemimpinan baik akan mampu menciptakan budaya organisasi yang positif serta membangun komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan berbagai program pendidikan.

Dalam implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA), kepemimpinan kepala sekolah menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan program. Kepala sekolah harus mampu membangun komitmen bersama bahwa sekolah merupakan tempat yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, yang diwujudkan melalui penyusunan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak, pemberian teladan dalam memperlakukan peserta didik secara manusiawi, serta kemampuan mengajak guru, tenaga kependidikan, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan budaya sekolah yang ramah anak.

f. Kepala Sekolah sebagai Innovator

Perkembangan dunia pendidikan yang semakin dinamis menuntut kepala sekolah tidak hanya mampu mempertahankan sistem yang telah berjalan, tetapi juga menciptakan berbagai pembaruan sesuai kebutuhan sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai innovator, yaitu sosok yang mampu melahirkan gagasan, strategi, maupun program baru guna meningkatkan mutu pendidikan, dengan kreativitas, kemampuan berpikir visioner, serta keberanian mengambil keputusan inovatif agar sekolah mampu berkembang sesuai tuntutan zaman. Menurut Mulyasa (2022), kepala sekolah sebagai innovator harus mampu mencari, menemukan, dan melaksanakan gagasan baru yang bermanfaat bagi pengembangan sekolah melalui sikap konstruktif, kreatif, objektif, fleksibel, dan adaptif, sehingga inovasi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada perubahan fisik, tetapi juga mencakup pembaruan dalam pembelajaran, pengelolaan

peserta didik, pengembangan budaya sekolah, pemanfaatan teknologi informasi, hingga peningkatan profesionalisme guru.

Dalam implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA), kepala sekolah sebagai innovator memiliki peranan yang sangat strategis, karena program ini tidak cukup dilaksanakan melalui kebijakan administratif semata, melainkan memerlukan berbagai inovasi agar nilai-nilai perlindungan anak benar-benar menjadi budaya sekolah. Kepala sekolah dapat mengembangkan inovasi berupa pembelajaran berbasis disiplin positif, pembentukan tim sahabat anak, penyediaan ruang konseling yang nyaman, pengembangan media edukasi mengenai hak-hak anak, pemanfaatan teknologi sebagai sarana pelaporan perundungan, hingga kegiatan yang melibatkan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang peserta didik, sehingga keberhasilan SRA sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala sekolah menciptakan perubahan yang sesuai kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik.

g. Kepala Sekolah sebagai Motivator

Selain berperan sebagai innovator, kepala sekolah juga memiliki fungsi sebagai motivator, yaitu pemimpin yang mampu membangkitkan semangat, komitmen, dan antusiasme seluruh warga sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Motivasi menjadi salah satu faktor yang sangat memengaruhi kinerja guru, di mana guru yang termotivasi tinggi cenderung lebih berdedikasi, sedangkan yang kurang termotivasi mengalami penurunan produktivitas dan kualitas pelayanan. Peran ini dapat diwujudkan melalui tindakan nyata seperti memberikan penghargaan kepada guru berprestasi, membangun komunikasi terbuka, menciptakan suasana kerja harmonis, memberikan kesempatan pengembangan kompetensi, serta menjadi teladan dalam kedisiplinan dan etos kerja, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan partisipasi aktif seluruh warga sekolah.

Dalam implementasi SRA, fungsi motivator memiliki kedudukan yang sangat penting karena perubahan budaya sekolah tidak mungkin

terwujud apabila warga sekolah tidak memiliki komitmen yang sama. Kepala sekolah perlu memotivasi guru agar senantiasa menerapkan pembelajaran yang menghargai hak-hak anak, menghindari segala bentuk kekerasan, serta menciptakan suasana kelas yang aman dan menyenangkan, sekaligus memotivasi peserta didik agar berani menyampaikan pendapat, menghargai teman, dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya sekolah yang ramah anak.

3. Strategi Kepala Sekolah

Strategi kepala sekolah adalah serangkaian langkah, kebijakan, dan tindakan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah secara efektif dan efisien. Fred R. David (2020) menjelaskan bahwa strategi terdiri atas tiga tahap utama yang saling berkaitan, yaitu perumusan strategi (identifikasi kondisi internal-eksternal dan penetapan tujuan), implementasi strategi (mewujudkan kebijakan dalam program, pembagian tugas, dan koordinasi), serta evaluasi strategi (menilai keberhasilan dan menyusun langkah perbaikan). Rosmini, Ningsih, Murni, dan Adiyono (2024) menambahkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah masa kini dituntut mampu memengaruhi dan menggerakkan warga sekolah dengan mengedepankan komunikasi dan hubungan interpersonal yang baik di tengah transformasi pendidikan.

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan contoh nyata yang memerlukan strategi kepala sekolah yang terencana, karena tidak cukup dilaksanakan hanya melalui kebijakan atau fasilitas semata, melainkan menuntut perubahan budaya sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah, mulai dari penyusunan kebijakan perlindungan anak, pembangunan komitmen guru, kerja sama dengan orang tua, penyediaan lingkungan belajar yang aman, hingga pengawasan berkala. Dalam penelitian ini, strategi kepala sekolah dipahami sebagai keseluruhan kebijakan dan langkah yang dilakukan kepala sekolah dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi

implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SDN 1 Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang.

4. Kompetensi Kepala Sekolah

Kompetensi kepala sekolah merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap, serta kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin satuan pendidikan. Kompetensi tersebut menjadi landasan utama bagi kepala sekolah dalam mengelola sekolah secara profesional, mengambil keputusan yang tepat, membangun budaya organisasi yang positif, serta meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Dalam era perkembangan pendidikan yang semakin dinamis, kepala sekolah tidak lagi hanya dituntut mampu menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang adaptif, inovatif, serta mampu menghadapi berbagai perubahan kebijakan maupun tantangan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, kompetensi kepala sekolah menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah menetapkan lima kompetensi utama yang harus dimiliki kepala sekolah, yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Kelima kompetensi tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar bagi kepala sekolah dalam menjalankan tugas kepemimpinan secara profesional.

a. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepala sekolah dalam menunjukkan integritas, akhlak mulia, kedewasaan, kejujuran, keteladanan, serta komitmen terhadap nilai-nilai profesionalisme. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan harus menjadi contoh bagi seluruh warga sekolah, baik dalam bersikap, bertindak, maupun mengambil keputusan. Keteladanan tersebut menjadi modal utama dalam membangun budaya sekolah yang positif karena perilaku kepala sekolah akan

memengaruhi sikap guru, tenaga kependidikan, maupun peserta didik. Seorang kepala sekolah yang memiliki kompetensi kepribadian yang baik akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang penuh rasa saling menghormati, disiplin, tanggung jawab, dan integritas.

Dalam implementasi Program Sekolah Ramah Anak, kompetensi kepribadian memiliki peranan yang sangat penting. Kepala sekolah harus menunjukkan sikap yang menghargai hak-hak anak, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bersikap adil terhadap seluruh peserta didik, serta menjadi teladan dalam membangun budaya anti-kekerasan di lingkungan sekolah. Keteladanan tersebut akan menjadi contoh nyata bagi guru maupun peserta didik dalam membangun interaksi yang saling menghormati dan menghargai martabat setiap individu.

b. *Kompetensi Manajerial*

Kompetensi manajerial merupakan kemampuan kepala sekolah dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi seluruh program sekolah secara efektif dan efisien. Kompetensi ini menjadi inti dari pengelolaan sekolah karena berkaitan langsung dengan kemampuan kepala sekolah dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pendidikan. Kepala sekolah dituntut mampu menyusun perencanaan berbasis kebutuhan sekolah, mengembangkan organisasi pembelajaran, mengelola tenaga pendidik, mengoptimalkan sarana dan prasarana, mengelola keuangan secara akuntabel, serta membangun sistem evaluasi yang berkelanjutan. Penelitian mengenai kompetensi kepala sekolah menunjukkan bahwa kompetensi manajerial merupakan salah satu faktor yang paling dominan dalam meningkatkan mutu pendidikan karena berkaitan langsung dengan efektivitas pengelolaan sekolah.

Dalam penelitian ini, kompetensi manajerial menjadi sangat relevan karena implementasi Program Sekolah Ramah Anak memerlukan kemampuan kepala sekolah dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan seluruh warga sekolah, mengalokasikan sumber daya,

serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Tanpa kemampuan manajerial yang baik, berbagai program yang telah dirancang berpotensi tidak berjalan secara optimal.

c. Kompetensi Kewirausahaan

Kompetensi kewirausahaan merupakan kemampuan kepala sekolah dalam menciptakan inovasi, memanfaatkan peluang, bekerja keras, pantang menyerah, serta memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkan sekolah. Kompetensi ini tidak diartikan sebagai kemampuan menjalankan kegiatan bisnis, melainkan kemampuan membangun budaya inovasi dan perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pendidikan. Kepala sekolah dituntut memiliki keberanian untuk melakukan pembaruan sesuai dengan kebutuhan sekolah, mengembangkan berbagai program kreatif, serta mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi sekolah.

Dalam implementasi Program Sekolah Ramah Anak, kompetensi kewirausahaan tercermin dari kemampuan kepala sekolah menciptakan berbagai inovasi yang mendukung pemenuhan hak-hak anak. Misalnya, mengembangkan program disiplin positif, membangun ruang bermain edukatif, menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan orang tua, atau memanfaatkan teknologi sebagai media pelaporan apabila terjadi perundungan maupun kekerasan. Inovasi-inovasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program Sekolah Ramah Anak tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kreativitas kepala sekolah dalam mengembangkan program sesuai dengan karakteristik sekolah.

d. Kompetensi Supervisi

Kompetensi supervisi merupakan kemampuan kepala sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, serta menindaklanjuti kegiatan supervisi akademik guna meningkatkan profesionalisme guru. Supervisi tidak hanya bertujuan mengawasi pelaksanaan pembelajaran, tetapi lebih diarahkan pada proses pembinaan yang membantu guru meningkatkan kualitas

pembelajaran. Kepala sekolah perlu memberikan umpan balik yang konstruktif, memfasilitasi pelatihan, serta mendorong guru untuk terus mengembangkan kompetensinya.

Dalam kaitannya dengan Program Sekolah Ramah Anak, kompetensi supervisi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran telah menerapkan prinsip-prinsip pendidikan yang menghargai hak anak. Kepala sekolah perlu melakukan supervisi terhadap praktik pembelajaran, interaksi guru dengan peserta didik, penerapan disiplin positif, serta upaya pencegahan kekerasan dan perundungan. Melalui supervisi yang berkelanjutan, kualitas pembelajaran yang ramah anak dapat terus ditingkatkan sehingga tujuan Program Sekolah Ramah Anak dapat tercapai secara optimal.

e. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan kepala sekolah dalam membangun hubungan yang harmonis dengan guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, komite sekolah, maupun masyarakat. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, menyelesaikan konflik secara bijaksana, serta membangun kemitraan yang mendukung pengembangan sekolah. Kompetensi sosial menjadi sangat penting karena sekolah tidak dapat berkembang apabila hanya mengandalkan sumber daya internal tanpa dukungan dari masyarakat.

Dalam implementasi Program Sekolah Ramah Anak, kompetensi sosial diwujudkan melalui kemampuan kepala sekolah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan inklusif. Kerja sama dengan orang tua diperlukan untuk membangun kesamaan pola asuh antara rumah dan sekolah, sedangkan kemitraan dengan pemerintah, puskesmas, kepolisian, maupun lembaga perlindungan anak diperlukan dalam mendukung berbagai program perlindungan anak di sekolah. Melalui sinergi tersebut,

pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kompetensi kepala sekolah merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kelima kompetensi yang meliputi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan kepala sekolah menjalankan fungsi kepemimpinannya. Dalam penelitian ini, kelima kompetensi tersebut menjadi dasar yang memperkuat kemampuan kepala sekolah dalam menyusun strategi, menggerakkan seluruh warga sekolah, serta mengimplementasikan Program Sekolah Ramah Anak secara efektif sehingga mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi setiap peserta didik.

B. Strategi Kepala Sekolah Dalam Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA)

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan salah satu bentuk nyata komitmen sekolah dalam memenuhi hak-hak anak sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, inklusif, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Keberhasilan implementasi program tersebut tidak hanya ditentukan oleh tersedianya kebijakan pemerintah maupun kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, tetapi sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala sekolah dalam menyusun dan melaksanakan strategi yang tepat. Kepala sekolah sebagai pemimpin satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan, menggerakkan seluruh sumber daya sekolah, membangun komitmen bersama, serta melakukan evaluasi terhadap setiap program yang dijalankan. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SRA sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam program nyata yang melibatkan seluruh warga sekolah.

Dalam perspektif manajemen strategi, kepala sekolah perlu memandang Program Sekolah Ramah Anak sebagai bagian dari sistem pengelolaan sekolah secara menyeluruh, dimulai dari identifikasi kebutuhan, analisis kondisi internal dan eksternal, penetapan tujuan, penyusunan program kerja, pelaksanaan, hingga evaluasi berkelanjutan. Dalam konteks sekolah dasar, strategi tersebut harus disusun secara kontekstual, mempertimbangkan karakteristik peserta didik, budaya sekolah, kompetensi guru, dukungan orang tua, serta lingkungan masyarakat sekitar. Terdapat enam strategi utama yang perlu dijalankan kepala sekolah, sebagai berikut.

1. Penyusunan Kebijakan Sekolah yang Berpihak pada Kepentingan Terbaik Anak

Kepala sekolah perlu menetapkan aturan yang menjamin perlindungan anak dari kekerasan fisik, psikis, seksual, diskriminasi, maupun perundungan. Ini mencakup pembentukan tim pelaksana SRA, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penanganan kasus kekerasan, serta pengintegrasian prinsip perlindungan anak ke dalam tata tertib sekolah. Kebijakan ini tidak boleh berhenti di tataran administratif, melainkan harus menjadi budaya sekolah yang dipahami dan dijalankan seluruh warga sekolah, keberadaan kebijakan tertulis merupakan salah satu indikator utama keberhasilan SRA.

2. Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

Karena guru berinteraksi langsung dengan peserta didik setiap hari, kepala sekolah perlu menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan berkelanjutan tentang pembelajaran ramah anak, disiplin positif, komunikasi yang menghargai peserta didik, pencegahan perundungan, serta penanganan anak sesuai tahap perkembangannya. Supervisi akademik berkala juga diperlukan untuk memastikan prinsip SRA benar-benar diterapkan di kelas, bukan hanya dipahami secara teoretis.

3. Penciptaan Lingkungan Sekolah yang Aman, Sehat, Nyaman, dan Inklusif

Secara fisik, sekolah perlu memenuhi standar keamanan dan kesehatan: ruang kelas layak, sanitasi memadai, area bermain aman, ruang UKS, ruang konseling, tempat ibadah, hingga akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Namun lingkungan ramah anak tidak berhenti di fasilitas fisik, kepala sekolah juga harus membangun budaya saling menghargai, menghormati perbedaan, menyelesaikan konflik secara damai, dan menumbuhkan rasa aman bagi anak untuk bersuara atau melapor.

4. Penguatan Partisipasi Aktif Peserta Didik

Salah satu prinsip inti SRA adalah memberi ruang bagi anak menyampaikan pendapat sesuai usia dan perkembangannya. Kepala sekolah membangun budaya demokratis melalui pelibatan peserta didik dalam penyusunan tata tertib kelas, organisasi siswa, forum musyawarah, hingga evaluasi program sekolah. Partisipasi ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan percaya diri anak, sekaligus menjadi indikator penghormatan terhadap hak anak.

5. Pembangunan Kemitraan dengan Orang Tua, Komite Sekolah, dan Masyarakat

SRA tidak akan optimal jika hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Kepala sekolah perlu membangun komunikasi intensif dengan orang tua (sosialisasi, pertemuan rutin, *parenting education*, forum konsultasi), serta menjalin kerja sama dengan puskesmas, kepolisian, pemerintah desa, dinas pendidikan, dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kolaborasi ini memperkuat pengawasan anak sekaligus menyamakan persepsi tentang pentingnya perlindungan anak, baik di sekolah maupun di rumah.

6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi secara Berkelanjutan

Evaluasi diperlukan untuk mengukur sejauh mana SRA berjalan sesuai tujuan, mencakup kebijakan, proses pembelajaran, kondisi lingkungan, keterlibatan guru, partisipasi peserta didik, dan kerja sama dengan orang

tua/masyarakat. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan program secara berkala, sehingga hambatan dapat teridentifikasi dan solusinya segera dirumuskan. Dengan begitu, SRA tidak berhenti sebagai program administratif, melainkan berkembang menjadi budaya sekolah yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, strategi kepala sekolah dalam implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan rangkaian langkah sistematis, mulai dari penyusunan kebijakan, peningkatan kompetensi guru, penciptaan lingkungan yang aman dan inklusif, penguatan partisipasi peserta didik, kemitraan dengan orang tua dan masyarakat, hingga monitoring dan evaluasi berkelanjutan, yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks penelitian ini, keenam strategi tersebut menjadi kerangka analisis untuk melihat bagaimana kepala sekolah SDN 1 Pasanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi implementasi Program Sekolah Ramah Anak.

C. Sekolah Ramah Anak (SRA)

1. Pengertian Sekolah Ramah Anak (SRA)

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan penanaman nilai kemanusiaan yang mengarahkan peserta didik menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus mampu menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menghargai hak setiap peserta didik tanpa diskriminasi maupun kekerasan. Lingkungan sekolah yang diwarnai kekerasan, intimidasi, atau perundungan justru dapat menghambat perkembangan akademik maupun psikologis anak, menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak semata ditentukan oleh

kualitas pembelajaran, tetapi juga oleh sejauh mana sekolah menjamin perlindungan hak-hak anak.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan tersebut melahirkan konsep Sekolah Ramah Anak (SRA), yang berkembang sebagai implementasi prinsip perlindungan anak yang diakui secara internasional dan diadopsi ke dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021), Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan yang secara sadar, terencana, dan berkesinambungan menjamin serta memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan, melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Definisi ini menegaskan bahwa SRA tidak cukup diwujudkan lewat fasilitas fisik semata, melainkan harus tercermin dalam kebijakan sekolah, proses pembelajaran, pola komunikasi guru-siswa, budaya sekolah, hingga sistem pencegahan kekerasan dan diskriminasi.

Pandangan ini sejalan dengan Wuryandani (2022), yang menyatakan bahwa Sekolah Ramah Anak memberikan perlindungan, penghargaan, serta kesempatan bagi peserta didik untuk berpartisipasi sesuai hak, kebutuhan, dan tahap perkembangannya. Dengan kata lain, peserta didik tidak lagi diposisikan sebagai objek yang pasif menerima pembelajaran, melainkan sebagai subjek yang berhak menyampaikan pendapat, memperoleh perlakuan adil, dan berpartisipasi aktif, sehingga hubungan guru dan peserta didik perlu dibangun atas dasar saling menghormati dan saling percaya.

Secara lebih rinci, konsep SRA mencakup pemenuhan hak anak secara menyeluruh: hak atas pendidikan bermutu, hak menyampaikan pendapat, hak atas perlakuan setara tanpa diskriminasi, hak atas lingkungan belajar yang sehat dan aman, serta hak mengembangkan potensi diri secara maksimal. Dalam praktiknya, hak-hak tersebut diwujudkan melalui tata tertib yang menjunjung nilai kemanusiaan, pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, sarana-prasarana yang aman, komunikasi yang harmonis antara guru dan peserta didik, pelibatan orang tua dan masyarakat, serta mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan maupun perundungan. Keberhasilan

seluruh upaya ini sangat bergantung pada komitmen warga sekolah, terutama kepala sekolah selaku pemimpin yang berwenang merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan berlandaskan pemenuhan hak anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, penghargaan terhadap martabat peserta didik, serta pemberian ruang partisipasi aktif bagi anak. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi menempatkan pemenuhan hak anak sebagai prioritas dalam setiap kebijakan dan kegiatan sekolah, sekaligus menjadi fondasi pembentukan karakter peserta didik sejak usia sekolah dasar. Dalam konteks penelitian ini, konsep Sekolah Ramah Anak menjadi landasan utama untuk mengkaji bagaimana strategi kepala sekolah mengimplementasikan kebijakan dan program yang menciptakan lingkungan pendidikan aman, nyaman, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak di SDN 1 Pasanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang.

2. Dasar Hukum Sekolah Ramah Anak

Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Indonesia tidak muncul sebagai sebuah program yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari implementasi berbagai kebijakan nasional maupun komitmen internasional dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Keberadaan dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak di lingkungan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab moral seluruh warga sekolah, tetapi juga merupakan kewajiban yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan berkewajiban menyelenggarakan proses pendidikan yang menjunjung tinggi hak-hak anak, memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sehat, inklusif, dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Berbagai regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah menjadi pedoman sekaligus landasan bagi sekolah dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai

program yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak di lingkungan pendidikan.

Landasan hukum pertama yang menjadi dasar penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Kedua ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mampu memberikan perlindungan terhadap peserta didik sekaligus menjamin kesempatan belajar yang aman, adil, dan bermutu bagi setiap anak tanpa membedakan latar belakang apa pun.

Landasan hukum berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi akademik, tetapi juga harus memperhatikan penghormatan terhadap hak-hak peserta didik sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak yang sama. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) juga menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dengan demikian, sekolah memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada seluruh peserta didik tanpa adanya perlakuan diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, suku, kondisi ekonomi, kemampuan akademik, maupun kondisi fisik peserta didik.

Selain Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pelaksanaan Sekolah Ramah Anak juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut memberikan penegasan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, maupun diskriminasi, termasuk ketika berada di lingkungan pendidikan. Pada Pasal 54 disebutkan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, maupun bentuk perlakuan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik lain, maupun pihak lain. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa sekolah memiliki kewajiban hukum untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman serta bebas dari segala bentuk kekerasan. Oleh sebab itu, penerapan Program Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak dalam lingkungan pendidikan.

Secara lebih khusus, pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Peraturan ini menjadi pedoman utama bagi sekolah dalam mengembangkan Program Sekolah Ramah Anak di seluruh Indonesia. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Sekolah Ramah Anak merupakan satuan pendidikan yang secara sadar berupaya menjamin, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan melalui kebijakan, proses pembelajaran, pengelolaan sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi seluruh warga sekolah. Peraturan tersebut juga menegaskan bahwa pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, penghormatan terhadap hak hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Dengan adanya regulasi tersebut, sekolah memiliki pedoman yang jelas

dalam merancang berbagai program yang mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang ramah anak.

Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari komitmen pemerintah terhadap Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam berbagai kebijakan nasional. Konvensi Hak Anak menegaskan empat prinsip utama, yaitu prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup serta tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Keempat prinsip tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyelenggaraan Program Sekolah Ramah Anak di Indonesia. Dengan demikian, sekolah tidak hanya berkewajiban memberikan layanan pendidikan, tetapi juga harus menghormati hak peserta didik untuk berpartisipasi, memperoleh perlindungan, serta berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Dalam perkembangannya, kebijakan mengenai perlindungan anak di lingkungan pendidikan juga diperkuat melalui berbagai regulasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menekankan pentingnya pencegahan serta penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Berbagai kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah berupaya membangun sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan mutu akademik, tetapi juga menjamin kesejahteraan, keamanan, dan kesehatan psikologis peserta didik. Sekolah didorong untuk membangun mekanisme pencegahan kekerasan, menyediakan layanan pengaduan yang mudah diakses peserta didik, memperkuat pendidikan karakter, serta membangun kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. Kebijakan-kebijakan tersebut semakin memperkuat posisi Program Sekolah Ramah Anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan mutu pendidikan nasional.

Berdasarkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, dapat dipahami bahwa Program Sekolah Ramah Anak memiliki landasan hukum yang sangat kuat, mulai dari konstitusi negara, undang-undang, peraturan menteri, hingga komitmen internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan dalam setiap penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks penelitian ini, dasar hukum tersebut menjadi pijakan normatif bagi kepala sekolah dalam menyusun strategi, menetapkan kebijakan, serta mengimplementasikan Program Sekolah Ramah Anak di SDN 1 Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang sehingga seluruh kegiatan pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bebas dari kekerasan, diskriminasi, maupun berbagai bentuk perlakuan yang merugikan peserta didik.

3. Tujuan Dan Prinsip Sekolah Ramah Anak

Program Sekolah Ramah Anak (SRA) pada hakikatnya diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh. Program ini tidak hanya bertujuan menghilangkan berbagai bentuk kekerasan yang masih terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga diarahkan untuk membangun budaya sekolah yang menghargai martabat peserta didik, mendorong partisipasi aktif anak, serta menciptakan proses pembelajaran yang aman, nyaman, sehat, inklusif, dan menyenangkan. Dalam konteks tersebut, Sekolah Ramah Anak dipandang sebagai salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pendekatan yang berpusat pada kepentingan terbaik bagi peserta didik. Dengan demikian, keberhasilan Program Sekolah Ramah Anak tidak hanya diukur dari tersedianya berbagai fasilitas fisik di sekolah, tetapi juga dari sejauh mana sekolah mampu menciptakan iklim pendidikan yang menghormati hak-hak anak serta mendukung perkembangan mereka secara optimal.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021), tujuan utama Program Sekolah Ramah Anak adalah mewujudkan satuan pendidikan yang mampu menjamin pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak anak selama berada di lingkungan sekolah. Tujuan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun perlakuan lain yang dapat menghambat tumbuh kembang peserta didik. Selain itu, Program Sekolah Ramah Anak juga bertujuan membangun lingkungan sekolah yang bersih, sehat, aman, peduli terhadap lingkungan, serta mampu memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan tahap perkembangannya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa tujuan Sekolah Ramah Anak memiliki cakupan yang luas karena tidak hanya berkaitan dengan perlindungan fisik anak, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, emosional, dan intelektual peserta didik.

Tujuan Sekolah Ramah Anak juga dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui penciptaan lingkungan belajar yang lebih humanis. Lingkungan pendidikan yang menghargai hak-hak anak akan memberikan rasa aman kepada peserta didik sehingga mereka mampu mengikuti proses pembelajaran dengan lebih percaya diri, aktif, dan kreatif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peserta didik yang belajar dalam lingkungan yang aman dan bebas dari tekanan memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi, mampu membangun hubungan sosial yang lebih baik, serta menunjukkan perkembangan karakter yang lebih positif dibandingkan peserta didik yang berada pada lingkungan pendidikan yang penuh intimidasi maupun kekerasan. Oleh karena itu, tujuan Sekolah Ramah Anak tidak hanya berkaitan dengan perlindungan anak, tetapi juga menjadi bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Secara lebih rinci, tujuan penyelenggaraan Program Sekolah Ramah Anak dapat dijabarkan ke dalam beberapa aspek. Pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, bersih, sehat, dan menyenangkan

bagi seluruh peserta didik. Lingkungan belajar yang demikian akan memberikan rasa aman sehingga anak dapat belajar tanpa rasa takut, tekanan, maupun ancaman dari pihak mana pun. Kondisi tersebut menjadi prasyarat penting bagi terciptanya proses pembelajaran yang efektif karena peserta didik akan lebih mudah berkonsentrasi dan mengembangkan potensinya apabila berada dalam lingkungan yang memberikan rasa nyaman secara fisik maupun psikologis. tujuan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

a. Mencegah Terjadinya Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah.

Kekerasan yang dimaksud tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan verbal, kekerasan psikis, kekerasan seksual, perundungan (*bullying*), diskriminasi, maupun bentuk perlakuan lain yang dapat merugikan peserta didik. Pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan menjadi salah satu tujuan utama Program Sekolah Ramah Anak karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan pada masa sekolah dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis, prestasi belajar, maupun kehidupan sosial peserta didik. Oleh sebab itu, sekolah harus mampu membangun sistem pencegahan, penanganan, dan pemulihan yang efektif terhadap setiap kasus kekerasan yang terjadi.

b. Menjamin Terpenuhinya Hak-Hak Anak Selama Mengikuti Proses Pendidikan.

Setiap peserta didik memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, mendapatkan perlakuan yang adil, menyampaikan pendapat, memperoleh perlindungan, serta mengembangkan potensi dirinya tanpa adanya diskriminasi. Sekolah Ramah Anak bertujuan memastikan bahwa seluruh hak tersebut benar-benar terpenuhi melalui kebijakan, program, maupun budaya sekolah yang berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga menjadi

lingkungan yang mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal.

- c. Meningkatkan Partisipasi Peserta Didik Dalam Berbagai Kegiatan Sekolah.

Salah satu ciri utama Sekolah Ramah Anak adalah adanya penghargaan terhadap suara dan pendapat anak. Peserta didik diberikan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam organisasi siswa, penyusunan tata tertib kelas, kegiatan ekstrakurikuler, musyawarah sekolah, maupun berbagai kegiatan lainnya. Pelibatan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepemimpinan, serta kemampuan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.

- d. Memperkuat Kerja Sama Antara Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat Dalam Mendukung Perlindungan Serta Tumbuh Kembang Anak.

Pendidikan yang ramah anak tidak dapat diwujudkan apabila hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun karakter anak. Demikian pula masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman bagi perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, Program Sekolah Ramah Anak mendorong terbentuknya sinergi antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat sehingga perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara berkelanjutan baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Selain memiliki tujuan yang jelas, Program Sekolah Ramah Anak juga diselenggarakan berdasarkan sejumlah prinsip yang menjadi landasan dalam setiap kebijakan maupun kegiatan sekolah. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman agar seluruh pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak tetap berorientasi pada pemenuhan hak-hak peserta didik serta sesuai dengan nilai-

nilai perlindungan anak yang diakui secara nasional maupun internasional. Prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

1) Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan, kebijakan, maupun tindakan yang dilakukan oleh sekolah harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi peserta didik. Seluruh program yang dirancang harus memberikan manfaat bagi perkembangan fisik, mental, emosional, sosial, maupun intelektual anak. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dituntut untuk menjadikan kepentingan peserta didik sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan sehingga tidak ada kebijakan yang justru merugikan atau menghambat perkembangan anak.

2) Non-Diskriminasi.

Setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, bahasa, kondisi ekonomi, kemampuan akademik, maupun kondisi fisik. Sekolah wajib memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Penerapan prinsip non-diskriminasi juga berarti sekolah harus mampu menghargai keberagaman sebagai kekayaan yang perlu dipelihara melalui budaya saling menghormati dan menghargai perbedaan.

3) Partisipasi Anak.

Peserta didik bukan sekadar penerima layanan pendidikan, tetapi merupakan subjek yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka di sekolah. Oleh karena itu, sekolah perlu menyediakan ruang yang memungkinkan peserta didik berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran maupun kegiatan sekolah lainnya. Pendapat yang disampaikan oleh peserta didik harus dihargai dan dipertimbangkan sesuai dengan usia serta tingkat kedewasaannya. Melalui partisipasi

tersebut, peserta didik akan belajar bertanggung jawab, percaya diri, serta mampu membangun budaya demokrasi sejak dini.

4) Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, Dan Perkembangan Anak.

Seluruh penyelenggaraan pendidikan harus mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal, baik dari aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun spiritual. Sekolah harus memastikan bahwa seluruh lingkungan belajar memberikan rasa aman, mendukung kesehatan peserta didik, serta mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki setiap anak. Oleh karena itu, penyediaan sarana prasarana yang aman, pelayanan kesehatan sekolah, pembelajaran yang menyenangkan, hingga kegiatan pengembangan karakter menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan prinsip ini.

4. Perlindungan Terhadap Anak Dari Segala Bentuk Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah.

Sekolah berkewajiban membangun sistem perlindungan yang mampu mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak. Kepala sekolah bersama seluruh warga sekolah harus memiliki komitmen untuk menciptakan budaya anti-kekerasan melalui penerapan disiplin positif, penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, penanganan kasus secara profesional, serta pemberian pendampingan kepada peserta didik yang menjadi korban kekerasan. Prinsip ini menjadi salah satu inti dari penyelenggaraan Program Sekolah Ramah Anak karena tanpa adanya perlindungan yang memadai, tujuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik tidak akan dapat terwujud secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tujuan dan prinsip Sekolah Ramah Anak merupakan dua komponen yang saling melengkapi dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan memberikan arah mengenai hasil yang ingin dicapai, sedangkan prinsip menjadi landasan dalam setiap proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman mengenai tujuan dan prinsip Sekolah Ramah Anak menjadi dasar untuk

menganalisis strategi kepala sekolah dalam merancang berbagai kebijakan, menggerakkan seluruh warga sekolah, serta membangun budaya sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan menghargai hak-hak peserta didik di SDN 1 Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang.

5. Karakteristik Sekolah Ramah Anak

Karakteristik Sekolah Ramah Anak merupakan ciri-ciri yang menunjukkan bahwa suatu satuan pendidikan telah menerapkan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dalam seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan. Karakteristik tersebut menjadi pembeda antara sekolah yang hanya berorientasi pada penyelenggaraan pembelajaran dengan sekolah yang benar-benar menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam setiap kebijakan dan kegiatan pendidikan. Kehadiran karakteristik Sekolah Ramah Anak menunjukkan bahwa proses pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian prestasi akademik, tetapi juga memberikan perhatian terhadap aspek perlindungan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, serta perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Oleh karena itu, karakteristik Sekolah Ramah Anak harus tercermin dalam budaya sekolah, kebijakan, proses pembelajaran, hubungan antarwarga sekolah, hingga penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021), sekolah yang menerapkan Program Sekolah Ramah Anak memiliki karakteristik yang berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak, bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, memberikan ruang partisipasi kepada peserta didik, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama berada di lingkungan sekolah. Karakteristik tersebut tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kebijakan tertulis, tetapi juga tercermin dalam perilaku seluruh warga sekolah sehingga tercipta budaya sekolah yang menghargai setiap peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama, suku, jenis kelamin, maupun kondisi fisiknya. Dengan demikian, Sekolah Ramah Anak menjadi lingkungan yang mampu

memberikan rasa aman sekaligus mendukung perkembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Adapun karakteristik Sekolah Ramah Anak adalah sebagai berikut :

a. Lingkungan Sekolah Yang Aman dan Bebas Dari Kekerasan.

Lingkungan yang aman merupakan kebutuhan dasar setiap peserta didik dalam menjalani proses pendidikan. Rasa aman tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik sekolah, tetapi juga mencakup keamanan psikologis peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Sekolah harus mampu mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, verbal, psikis, seksual, maupun perundungan yang dapat mengganggu perkembangan peserta didik. Seluruh warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang menghargai martabat anak sehingga setiap peserta didik merasa nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Guru dituntut menggunakan pendekatan disiplin positif, menghindari hukuman yang bersifat fisik maupun verbal, serta menyelesaikan setiap permasalahan melalui dialog dan pembinaan yang bersifat edukatif. Dengan adanya lingkungan yang aman, peserta didik akan lebih percaya diri, memiliki keberanian untuk mengemukakan pendapat, serta mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

b. Terpenuhinya Hak-Hak Anak Dalam Proses Pendidikan.

Sekolah Ramah Anak menjamin bahwa setiap peserta didik memperoleh hak untuk belajar, memperoleh perlindungan, mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, serta memperoleh kesempatan mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan tahap perkembangannya. Pemenuhan hak anak juga mencakup hak untuk memperoleh informasi, hak untuk bermain, hak atas kesehatan, hak memperoleh perlakuan yang adil, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Seluruh hak tersebut harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga setiap kebijakan yang diambil sekolah selalu mengutamakan

kepentingan terbaik bagi anak. Oleh sebab itu, sekolah tidak hanya berorientasi pada pencapaian nilai akademik, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan fisik, mental, emosional, dan sosial peserta didik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan.

c. Pelaksanaan Pembelajaran Yang Ramah Anak.

Pembelajaran yang ramah anak merupakan proses pembelajaran yang menghargai peserta didik sebagai individu yang memiliki potensi, kemampuan, serta karakteristik yang berbeda-beda. Guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber informasi, melainkan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik agar mampu belajar secara aktif, kreatif, kritis, dan menyenangkan. Pembelajaran harus dilaksanakan tanpa tekanan, ancaman, maupun perlakuan yang merendahkan martabat peserta didik. Sebaliknya, guru perlu memberikan penghargaan terhadap setiap usaha yang dilakukan peserta didik, memberikan kesempatan bertanya, berdiskusi, berpendapat, serta membangun suasana belajar yang menyenangkan. Melalui pembelajaran yang demikian, peserta didik akan merasa dihargai sehingga motivasi belajar mereka meningkat dan perkembangan akademik maupun karakter dapat berlangsung secara seimbang.

d. Adanya Partisipasi Aktif Peserta Didik Dalam Kehidupan Sekolah.

Salah satu prinsip utama Sekolah Ramah Anak adalah penghormatan terhadap hak anak untuk menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, sekolah perlu memberikan ruang kepada peserta didik untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, mulai dari penyusunan aturan kelas, kegiatan organisasi siswa, kegiatan ekstrakurikuler, hingga penyampaian aspirasi mengenai berbagai kebijakan sekolah. Partisipasi tersebut penting karena mampu menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab, kemampuan berkomunikasi, serta kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Peserta didik yang diberikan kesempatan untuk berpartisipasi akan merasa memiliki sekolah sehingga lebih terdorong

menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, serta menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama warga sekolah. Dengan demikian, sekolah benar-benar menjadi tempat yang memberikan ruang bagi anak untuk berkembang sesuai dengan hak dan potensinya.

- e. Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Memiliki Perspektif Ramah Anak.

Guru dan tenaga kependidikan merupakan pihak yang setiap hari berinteraksi dengan peserta didik sehingga sikap dan perilaku mereka sangat menentukan keberhasilan implementasi Program Sekolah Ramah Anak. Guru dituntut memahami hak-hak anak, menerapkan pembelajaran yang menghargai perbedaan, menghindari segala bentuk kekerasan, serta mampu memberikan perlindungan kepada peserta didik apabila menghadapi berbagai permasalahan. Selain itu, tenaga kependidikan juga harus memberikan pelayanan yang santun, menghormati peserta didik, serta membantu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Seluruh warga sekolah perlu memiliki komitmen yang sama dalam menerapkan budaya ramah anak sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang positif selama berada di sekolah.

- f. Tersedianya Sarana Dan Prasarana Yang Mendukung Tumbuh Kembang Anak.

Lingkungan fisik sekolah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kenyamanan peserta didik dalam belajar. Oleh karena itu, sekolah harus menyediakan fasilitas yang aman, bersih, sehat, nyaman, serta mudah diakses oleh seluruh peserta didik. Fasilitas tersebut meliputi ruang kelas yang layak, sanitasi yang bersih, tempat bermain yang aman, ruang UKS, perpustakaan, tempat ibadah, ruang konseling, kantin sehat, serta berbagai fasilitas lainnya yang menunjang proses pembelajaran. Selain memperhatikan aspek keamanan, penyediaan sarana dan prasarana juga harus mempertimbangkan kebutuhan peserta

didik berkebutuhan khusus agar seluruh anak memperoleh kesempatan belajar yang sama tanpa diskriminasi.

g. Terjalannya Kemitraan Antara Sekolah, Orang Tua dan Masyarakat.

Sekolah Ramah Anak tidak dapat diwujudkan apabila hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Keberhasilan program ini memerlukan dukungan orang tua, komite sekolah, pemerintah, serta masyarakat sekitar. Kepala sekolah perlu membangun komunikasi yang intensif melalui berbagai kegiatan seperti pertemuan orang tua, sosialisasi, pendidikan parenting, maupun kerja sama dengan berbagai lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak. Kolaborasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi mengenai pentingnya pemenuhan hak anak baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Dengan adanya sinergi antara sekolah dan masyarakat, proses pendidikan akan berlangsung secara lebih efektif karena peserta didik memperoleh lingkungan yang mendukung perkembangan mereka secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa karakteristik Sekolah Ramah Anak tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup kebijakan, budaya sekolah, proses pembelajaran, hubungan sosial, serta keterlibatan seluruh warga sekolah dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan menghargai hak-hak anak. Karakteristik tersebut saling berkaitan dan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi Program Sekolah Ramah Anak. Dalam penelitian ini, karakteristik Sekolah Ramah Anak menjadi dasar untuk menganalisis sejauh mana SDN 1 Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang telah menerapkan prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak melalui berbagai kebijakan dan strategi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah bersama seluruh warga sekolah.

6. Indikator Sekolah Ramah Anak

Indikator Sekolah Ramah Anak merupakan ukuran atau tolok ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu satuan pendidikan telah mengimplementasikan prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak dalam penyelenggaraan pendidikan. Keberadaan indikator tersebut sangat penting karena pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak tidak cukup hanya dinilai dari adanya kebijakan atau deklarasi sekolah sebagai Sekolah Ramah Anak, tetapi harus tercermin dalam berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan yang dapat diamati secara nyata. Dengan adanya indikator yang jelas, sekolah dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki agar tujuan Sekolah Ramah Anak dapat tercapai secara optimal.

Pada dasarnya, indikator Sekolah Ramah Anak disusun berdasarkan prinsip pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Melalui berbagai regulasi tersebut, sekolah diwajibkan menyelenggarakan pendidikan yang menjamin hak anak untuk memperoleh perlindungan, pelayanan pendidikan yang berkualitas, kesempatan berpartisipasi, serta lingkungan belajar yang aman, sehat, nyaman, dan inklusif. Oleh karena itu, indikator Sekolah Ramah Anak tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik sekolah, tetapi juga mencakup kebijakan, proses pembelajaran, budaya sekolah, hingga keterlibatan seluruh warga sekolah dalam mendukung tumbuh kembang peserta didik.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021), terdapat enam indikator utama dalam implementasi Program Sekolah Ramah Anak, yaitu kebijakan Sekolah Ramah Anak, pelaksanaan pembelajaran yang ramah anak, pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih mengenai hak anak, sarana dan prasarana yang mendukung,

partisipasi peserta didik, serta partisipasi orang tua, masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni. Keenam indikator tersebut saling berkaitan sehingga keberhasilan implementasi Program Sekolah Ramah Anak tidak dapat diukur hanya melalui salah satu indikator saja, melainkan harus dipenuhi secara menyeluruh. Adapun indikator Sekolah Ramah Anak adalah sebagai berikut :

a. Adanya Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Kebijakan merupakan landasan utama dalam pelaksanaan seluruh program sekolah. Sekolah yang menerapkan Program Sekolah Ramah Anak harus memiliki berbagai kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Kebijakan tersebut dapat berupa surat keputusan pembentukan Tim Sekolah Ramah Anak, tata tertib sekolah yang melarang segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap anak, serta berbagai aturan lain yang menjamin terpenuhinya hak-hak peserta didik. Kebijakan tersebut tidak hanya disusun sebagai dokumen administratif, tetapi harus disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah sehingga menjadi pedoman dalam setiap aktivitas pendidikan. Kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menyusun, mengimplementasikan, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut agar benar-benar diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Yang Ramah Anak.

Pembelajaran merupakan inti dari penyelenggaraan pendidikan sehingga kualitas implementasi Sekolah Ramah Anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana guru melaksanakan proses belajar mengajar di dalam kelas. Pembelajaran yang ramah anak dilaksanakan dengan menghargai hak-hak peserta didik, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, mengembangkan kreativitas, serta menciptakan suasana belajar yang aman, menyenangkan, dan bebas dari tekanan. Guru dituntut menggunakan metode pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, serta menghindari

penggunaan hukuman fisik maupun verbal yang dapat menimbulkan trauma pada peserta didik. Selain itu, guru juga harus memperhatikan perbedaan kemampuan, karakteristik, latar belakang sosial, budaya, maupun kebutuhan khusus peserta didik sehingga seluruh anak memperoleh kesempatan belajar yang sama. Dengan demikian, pembelajaran yang ramah anak menjadi salah satu bentuk nyata penghormatan terhadap hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

- c. Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Memiliki Pemahaman Mengenai Hak Anak.

Guru dan tenaga kependidikan merupakan aktor utama yang berinteraksi langsung dengan peserta didik setiap hari. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Program Sekolah Ramah Anak sangat dipengaruhi oleh kompetensi, sikap, dan perilaku mereka dalam memberikan pelayanan pendidikan. Guru harus memahami prinsip-prinsip perlindungan anak, menerapkan disiplin positif, menghormati keberagaman, serta mampu menciptakan hubungan yang harmonis dengan peserta didik. Di samping itu, tenaga kependidikan juga harus memberikan pelayanan yang ramah, sopan, dan menghargai hak-hak peserta didik. Untuk mendukung hal tersebut, kepala sekolah perlu menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan, workshop, bimbingan teknis, maupun supervisi yang berkaitan dengan pendidikan ramah anak sehingga seluruh tenaga pendidik memiliki pemahaman yang sama mengenai implementasi Program Sekolah Ramah Anak.

- d. Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Sekolah Ramah Anak.

Lingkungan fisik sekolah memiliki pengaruh yang besar terhadap kenyamanan dan keamanan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu, sekolah harus menyediakan berbagai fasilitas yang aman, bersih, sehat, nyaman, dan mudah diakses oleh seluruh peserta didik. Sarana dan prasarana tersebut meliputi ruang

kelas yang layak, sanitasi yang bersih, air bersih, ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), perpustakaan, ruang konseling, tempat ibadah, kantin sehat, area bermain, tempat pembuangan sampah, jalur evakuasi bencana, serta berbagai fasilitas lain yang menunjang kebutuhan peserta didik. Selain itu, sekolah juga perlu menyediakan aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk penerapan prinsip inklusivitas. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada peserta didik sehingga mereka dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal.

e. Adanya Partisipasi Aktif Peserta Didik Dalam Berbagai Kegiatan Sekolah.

Salah satu prinsip dasar Sekolah Ramah Anak adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat serta berpartisipasi dalam berbagai proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui keterlibatan peserta didik dalam organisasi sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, penyusunan tata tertib kelas, forum diskusi, kegiatan kebersihan lingkungan, maupun berbagai program sekolah lainnya. Dengan adanya partisipasi tersebut, peserta didik akan belajar bertanggung jawab, menghargai pendapat orang lain, bekerja sama, serta memiliki rasa kepemilikan terhadap lingkungan sekolah. Selain itu, keterlibatan peserta didik juga menjadi sarana bagi sekolah untuk mengetahui kebutuhan dan aspirasi mereka sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

f. Partisipasi Orang Tua, Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni Dalam Mendukung Program Sekolah Ramah Anak.

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak tidak dapat berjalan secara optimal apabila hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Dukungan dari keluarga dan masyarakat sangat diperlukan agar

pendidikan yang diterima peserta didik di sekolah sejalan dengan pola pengasuhan di lingkungan keluarga. Kepala sekolah perlu membangun komunikasi yang baik dengan orang tua melalui pertemuan rutin, kegiatan parenting, konsultasi perkembangan peserta didik, maupun berbagai bentuk kerja sama lainnya. Selain itu, sekolah juga dapat menjalin kemitraan dengan puskesmas, kepolisian, dinas pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, organisasi masyarakat, dunia usaha, maupun alumni dalam mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Sinergi tersebut akan memperkuat pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang aman, sehat, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa indikator Sekolah Ramah Anak merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi Program Sekolah Ramah Anak di suatu satuan pendidikan. Keenam indikator yang meliputi kebijakan sekolah, proses pembelajaran yang ramah anak, pendidik dan tenaga kependidikan yang memahami hak anak, sarana dan prasarana yang mendukung, partisipasi peserta didik, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Apabila seluruh indikator tersebut dapat diterapkan secara konsisten, maka sekolah akan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, bebas dari kekerasan, serta benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik bagi setiap anak. Dalam penelitian ini, indikator-indikator tersebut menjadi acuan untuk menganalisis implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SDN 1 Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang serta menilai sejauh mana strategi kepala sekolah mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan program tersebut.

7. Komponen Sekolah Ramah Anak

Komponen Sekolah Ramah Anak merupakan unsur-unsur utama yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan dalam mengimplementasikan Program Sekolah Ramah Anak secara menyeluruh. Komponen tersebut menjadi bagian yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak tidak hanya ditentukan oleh satu aspek tertentu, melainkan oleh keterpaduan seluruh unsur yang mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, inklusif, serta menghormati hak-hak anak. Dengan kata lain, Sekolah Ramah Anak bukan sekadar program yang diwujudkan melalui penyusunan kebijakan atau penyediaan fasilitas fisik, tetapi merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan seluruh warga sekolah, orang tua, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memenuhi hak-hak anak secara optimal.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021), pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak dibangun atas beberapa komponen utama yang saling mendukung. Komponen-komponen tersebut meliputi kebijakan sekolah yang berpihak pada anak, pelaksanaan kurikulum dan proses pembelajaran yang ramah anak, pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki perspektif perlindungan anak, penyediaan sarana dan prasarana yang aman, partisipasi peserta didik, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat. Keseluruhan komponen tersebut harus berjalan secara terpadu sehingga mampu menciptakan budaya sekolah yang benar-benar menghormati hak anak dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. komponen Sekolah Ramah Anak terdiri atas beberapa aspek sebagai berikut :

a. Kebijakan Sekolah Yang Berpihak Kepada Anak.

Kebijakan merupakan dasar utama dalam penyelenggaraan seluruh program sekolah, termasuk Program Sekolah Ramah Anak. Sekolah harus memiliki kebijakan yang secara tegas menjamin perlindungan terhadap hak-hak peserta didik serta melarang segala

bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun perlakuan yang merendahkan martabat anak. Kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan visi dan misi sekolah yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, pembentukan Tim Sekolah Ramah Anak, penyusunan tata tertib yang menerapkan disiplin positif, serta mekanisme penanganan pengaduan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Kepala sekolah sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan tersebut dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh warga sekolah sehingga tidak berhenti hanya sebagai dokumen administratif.

b. Pelaksanaan Kurikulum dan Proses Pembelajaran Yang Ramah Anak.

Kurikulum merupakan pedoman utama dalam penyelenggaraan pembelajaran, sedangkan proses pembelajaran merupakan kegiatan yang secara langsung melibatkan guru dan peserta didik. Dalam Sekolah Ramah Anak, pembelajaran harus dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan, minat, serta karakteristik peserta didik. Guru dituntut menggunakan metode pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan, serta menghargai keberagaman peserta didik. Selain itu, pembelajaran juga harus menghindari segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal, hukuman yang merendahkan martabat anak, serta perlakuan diskriminatif. Sebaliknya, guru perlu mengembangkan pendekatan yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, berani mengemukakan pendapat, bekerja sama, serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi sarana yang efektif dalam mewujudkan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Memiliki Komitmen Terhadap Perlindungan Anak.

Guru dan tenaga kependidikan merupakan pihak yang memiliki intensitas interaksi paling tinggi dengan peserta didik selama berada di sekolah. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Program Sekolah

Ramah Anak sangat bergantung pada kompetensi, sikap, dan perilaku mereka dalam memberikan pelayanan pendidikan. Guru harus memahami prinsip-prinsip hak anak, mampu menerapkan disiplin positif, menghargai perbedaan, serta menjadi teladan dalam membangun hubungan yang harmonis dengan peserta didik. Tenaga kependidikan juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari diskriminasi. Untuk mendukung hal tersebut, kepala sekolah perlu memberikan berbagai pelatihan, pembinaan, supervisi, maupun kegiatan pengembangan profesional agar seluruh tenaga pendidik memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep Sekolah Ramah Anak dan mampu mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

d. **Penyediaan Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Tumbuh Kembang Peserta Didik.**

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang memengaruhi kenyamanan, keamanan, dan kesehatan peserta didik selama mengikuti proses pendidikan. Sekolah Ramah Anak harus menyediakan lingkungan fisik yang bersih, sehat, aman, nyaman, dan mudah diakses oleh seluruh peserta didik, termasuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Fasilitas tersebut meliputi ruang kelas yang layak, sanitasi yang bersih, air bersih, ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), perpustakaan, ruang konseling, tempat ibadah, kantin sehat, area bermain yang aman, tempat pembuangan sampah, jalur evakuasi bencana, serta berbagai fasilitas lain yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan fisik peserta didik, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman sehingga mereka dapat belajar secara optimal tanpa merasa terancam atau terganggu.

e. Partisipasi Peserta Didik.

Salah satu prinsip utama Sekolah Ramah Anak adalah memberikan ruang kepada peserta didik untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui keterlibatan peserta didik dalam organisasi sekolah, penyusunan tata tertib kelas, kegiatan ekstrakurikuler, forum diskusi, musyawarah kelas, kegiatan kebersihan lingkungan, maupun berbagai kegiatan lainnya. Kesempatan untuk berpartisipasi akan menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, serta kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Selain itu, keterlibatan peserta didik juga memberikan kesempatan kepada sekolah untuk memahami kebutuhan, harapan, dan permasalahan yang dihadapi peserta didik sehingga kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

f. Keterlibatan Orang Tua, Keluarga dan Masyarakat.

Sekolah Ramah Anak tidak dapat diwujudkan hanya melalui upaya yang dilakukan oleh sekolah. Keberhasilan program ini memerlukan dukungan dari keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama bagi anak serta masyarakat sebagai lingkungan sosial tempat anak berinteraksi. Kepala sekolah perlu membangun komunikasi yang baik dengan orang tua melalui kegiatan parenting, pertemuan rutin, konsultasi perkembangan peserta didik, maupun berbagai bentuk kerja sama lainnya. Selain itu, sekolah juga perlu menjalin kemitraan dengan komite sekolah, pemerintah daerah, puskesmas, kepolisian, lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat, serta dunia usaha untuk mendukung berbagai program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Sinergi tersebut akan memperkuat pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak karena pendidikan dan perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Apabila dianalisis secara menyeluruh, keenam komponen Sekolah Ramah Anak tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi. Kebijakan sekolah menjadi dasar dalam pelaksanaan program, proses pembelajaran menjadi media utama pemenuhan hak anak, guru dan tenaga kependidikan berperan sebagai pelaksana, sarana dan prasarana mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, partisipasi peserta didik memastikan terpenuhinya hak anak untuk didengar, sedangkan keterlibatan orang tua dan masyarakat memperkuat keberlanjutan program di luar lingkungan sekolah. Apabila salah satu komponen tidak berjalan dengan baik, maka implementasi Program Sekolah Ramah Anak tidak akan berlangsung secara optimal. Oleh karena itu, seluruh komponen tersebut harus dikelola secara terpadu melalui strategi kepala sekolah yang efektif sehingga mampu membentuk budaya sekolah yang benar-benar berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa komponen Sekolah Ramah Anak merupakan unsur-unsur penting yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak. Komponen tersebut meliputi kebijakan sekolah, proses pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, partisipasi peserta didik, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dalam penelitian ini, komponen-komponen tersebut menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana strategi kepala sekolah di SDN 1 Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang mampu mengintegrasikan seluruh unsur tersebut sehingga implementasi Program Sekolah Ramah Anak dapat terlaksana secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi perkembangan peserta didik.

8. Implementasi Sekolah Ramah Anak

Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan proses penerapan kebijakan, program, dan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang mampu menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2021) menjelaskan

bahwa implementasi Program Sekolah Ramah Anak tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga menekankan perubahan budaya sekolah agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, implementasi Program Sekolah Ramah Anak diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sehat, inklusif, bebas dari kekerasan, diskriminasi, maupun perlakuan yang merendahkan martabat peserta didik.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2021), implementasi Program Sekolah Ramah Anak dilaksanakan melalui pemenuhan enam komponen utama, yaitu kebijakan sekolah yang berpihak kepada anak, pelaksanaan kurikulum dan proses pembelajaran yang ramah anak, pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki perspektif perlindungan anak, penyediaan sarana dan prasarana yang aman, partisipasi peserta didik, serta keterlibatan orang tua, keluarga, dan masyarakat. Keenam komponen tersebut harus dilaksanakan secara terpadu karena saling berkaitan dalam mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang menghormati hak-hak anak.

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak diawali dengan adanya komitmen seluruh warga sekolah dalam menjalankan kebijakan yang berpihak kepada anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2021) menjelaskan bahwa sekolah perlu menyusun visi, misi, dan program kerja yang mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak. Selain itu, sekolah juga perlu membentuk Tim Sekolah Ramah Anak, menerapkan tata tertib yang menggunakan disiplin positif, menyediakan mekanisme pengaduan, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program. Kebijakan tersebut menjadi dasar bagi seluruh warga sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

Pelaksanaan implementasi Sekolah Ramah Anak juga diwujudkan melalui proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student centered learning*). Khomsin, Jaya, dan Utami (2024) dalam kajian literatur

mereka menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di sekolah dasar harus memberi ruang partisipasi aktif bagi peserta didik dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar dampaknya terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat berjalan optimal.

Keberhasilan implementasi Program Sekolah Ramah Anak juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Mulyasa (2022) menyatakan bahwa kepala sekolah memiliki tanggung jawab dalam membina, mengembangkan, dan meningkatkan profesionalisme guru sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara optimal. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu menyelenggarakan pelatihan, supervisi, pembinaan, serta pendampingan secara berkelanjutan agar seluruh guru memahami konsep perlindungan anak, disiplin positif, pendidikan inklusif, dan pembelajaran yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi peserta didik. Dengan demikian, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai pelindung, pembimbing, dan teladan bagi peserta didik.

Selain sumber daya manusia, implementasi Program Sekolah Ramah Anak juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2021) menjelaskan bahwa sekolah harus menyediakan lingkungan fisik yang aman, bersih, sehat, nyaman, dan mudah diakses oleh seluruh peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Sarana tersebut meliputi ruang kelas yang layak, sanitasi yang bersih, Unit Kesehatan Sekolah (UKS), perpustakaan, ruang konseling, kantin sehat, tempat ibadah, area bermain, serta jalur evakuasi bencana. Penyediaan fasilitas tersebut bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal.

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak juga memberikan ruang bagi peserta didik untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sekolah. Hal ini juga dikuatkan oleh Alfian, Muallifatul, dan Filasofa (2024) yang menemukan bahwa implementasi Program Sekolah Ramah Anak berperan

penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak melalui pelibatan aktif peserta didik dan kerja sama dengan orang tua.

Selain melibatkan peserta didik, implementasi Program Sekolah Ramah Anak juga memerlukan dukungan dari orang tua, keluarga, dan masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2021) menjelaskan bahwa sekolah perlu membangun komunikasi yang baik dengan orang tua melalui kegiatan parenting, konsultasi perkembangan peserta didik, rapat komite sekolah, maupun berbagai bentuk kerja sama lainnya. Di samping itu, sekolah juga perlu menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah, puskesmas, kepolisian, lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat, dan dunia usaha agar pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, Edward III (1980) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Teori Edward III tersebut masih relevan digunakan hingga saat ini, sebagaimana terlihat pada penelitian Rosmini dkk. (2024) yang menerapkan kerangka komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk menganalisis efektivitas kebijakan pendidikan di era digital. Komunikasi yang efektif diperlukan agar seluruh warga sekolah memahami tujuan dan mekanisme Program Sekolah Ramah Anak. Sumber daya meliputi tenaga pendidik, anggaran, sarana prasarana, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Disposisi berkaitan dengan komitmen serta kesiapan seluruh pelaksana dalam menjalankan program, sedangkan struktur birokrasi berhubungan dengan pembagian tugas, koordinasi, serta mekanisme pengawasan yang jelas. Keempat faktor tersebut menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi Program Sekolah Ramah Anak di satuan pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sekolah Ramah Anak merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang

melibatkan seluruh komponen sekolah dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, inklusif, dan menghormati hak-hak anak. Implementasi tersebut mencakup kebijakan sekolah, proses pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, partisipasi peserta didik, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dalam penelitian ini, implementasi Program Sekolah Ramah Anak menjadi salah satu fokus analisis untuk mengetahui bagaimana strategi kepala sekolah di SDN 1 Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang mampu mengintegrasikan seluruh komponen tersebut sehingga pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

9. Faktor Pendukung Dan Penghambat Sekolah Ramah Anak

Keberhasilan implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari lingkungan internal maupun eksternal sekolah yang berfungsi sebagai pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan program. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2021) menjelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak sangat ditentukan oleh komitmen seluruh warga sekolah, dukungan keluarga, masyarakat, serta pemenuhan berbagai komponen yang menjadi standar penyelenggaraan Program Sekolah Ramah Anak. Oleh karena itu, identifikasi terhadap faktor pendukung dan penghambat menjadi bagian penting dalam mengevaluasi efektivitas implementasi Program Sekolah Ramah Anak.

a. Faktor Pendukung Implementasi Sekolah Ramah Anak

Salah satu faktor utama yang mendukung implementasi Program Sekolah Ramah Anak adalah kepemimpinan kepala sekolah. Mulyasa (2022) menyatakan bahwa kepala sekolah memiliki peran sebagai *Educator*, *manager*, *administrator*, *supervisor*, *leader*, *innovator*, dan *motivator* dalam mengelola satuan pendidikan. Peran tersebut menjadikan kepala sekolah sebagai tokoh utama yang menentukan arah kebijakan, membangun budaya sekolah, menggerakkan seluruh warga sekolah, serta

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak. Kepala sekolah yang memiliki komitmen tinggi terhadap perlindungan anak akan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi perkembangan peserta didik.

Faktor pendukung berikutnya adalah kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2021) menjelaskan bahwa guru dan tenaga kependidikan harus memiliki pemahaman mengenai hak-hak anak, perlindungan anak, pendidikan inklusif, serta disiplin positif. Kompetensi tersebut menjadi modal utama dalam menciptakan proses pembelajaran yang menghargai martabat peserta didik serta menghindarkan mereka dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun perlakuan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi melalui pelatihan, supervisi, dan pembinaan secara berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi Program Sekolah Ramah Anak.

Selain sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2021) menjelaskan bahwa sekolah perlu menyediakan lingkungan fisik yang aman, sehat, bersih, nyaman, dan mudah diakses oleh seluruh peserta didik. Sarana tersebut meliputi ruang kelas yang layak, perpustakaan, Unit Kesehatan Sekolah (UKS), ruang konseling, sanitasi yang bersih, kantin sehat, tempat ibadah, area bermain, serta jalur evakuasi bencana. Fasilitas yang memadai akan meningkatkan kenyamanan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran sekaligus mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang ramah anak.

Faktor pendukung lainnya adalah partisipasi aktif peserta didik. UNICEF (2009) menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dirinya. Dalam konteks Sekolah Ramah Anak, partisipasi

tersebut diwujudkan melalui keterlibatan peserta didik dalam organisasi sekolah, penyusunan tata tertib kelas, kegiatan ekstrakurikuler, forum diskusi, maupun berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan karakter. Keterlibatan peserta didik akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepemimpinan, serta kepedulian terhadap lingkungan sekolah.

Keberhasilan implementasi Program Sekolah Ramah Anak juga dipengaruhi oleh dukungan orang tua, keluarga, dan masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2021) menjelaskan bahwa pendidikan dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, sekolah perlu membangun komunikasi yang baik melalui kegiatan parenting, konsultasi perkembangan peserta didik, rapat komite sekolah, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, puskesmas, kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan berbagai organisasi masyarakat. Dukungan tersebut akan memperkuat keberlanjutan pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak.

b. Faktor Penghambat Implementasi Sekolah Ramah Anak

Di samping berbagai faktor pendukung, implementasi Program Sekolah Ramah Anak juga menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu hambatan yang sering dijumpai adalah belum meratanya pemahaman guru dan tenaga kependidikan mengenai konsep Sekolah Ramah Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2021) menjelaskan bahwa masih terdapat sekolah yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip perlindungan anak dalam proses pembelajaran maupun dalam penerapan disiplin di sekolah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan masih munculnya praktik pembelajaran yang kurang ramah terhadap peserta didik.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang sesuai dengan standar Sekolah Ramah Anak, seperti ruang konseling, fasilitas sanitasi yang memadai, area bermain yang aman, maupun aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan

khusus. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2021) menjelaskan bahwa keterbatasan fasilitas tersebut dapat memengaruhi kualitas layanan pendidikan dan kenyamanan peserta didik selama berada di lingkungan sekolah.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu kendala dalam implementasi Program Sekolah Ramah Anak. Mulyasa (2022) menyatakan bahwa keberhasilan suatu program pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dalam mengelola sumber daya, termasuk dukungan pembiayaan. Keterbatasan anggaran dapat menghambat pelaksanaan pelatihan guru, pengadaan fasilitas pendukung, maupun berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penguatan Program Sekolah Ramah Anak.

Faktor penghambat lainnya adalah rendahnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program. UNICEF (2009) menjelaskan bahwa pendidikan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga memerlukan dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial. Apabila komunikasi antara sekolah dengan orang tua tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak akan sulit mencapai hasil yang optimal karena pembentukan karakter peserta didik membutuhkan kesinambungan antara pendidikan di sekolah dan di lingkungan keluarga.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, Edward III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Hambatan implementasi akan muncul apabila komunikasi antarpelaksana tidak berjalan dengan baik, sumber daya yang tersedia belum memadai, komitmen pelaksana masih rendah, serta struktur birokrasi belum mampu mendukung koordinasi secara efektif. Oleh karena itu, keempat faktor tersebut perlu menjadi perhatian kepala sekolah dalam

mengimplementasikan Program Sekolah Ramah Anak agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Sekolah Ramah Anak dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang saling berkaitan. Faktor pendukung meliputi kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, partisipasi peserta didik, serta dukungan orang tua dan masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan pemahaman mengenai konsep Sekolah Ramah Anak, kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi orang tua, serta berbagai kendala implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, faktor-faktor tersebut menjadi dasar untuk menganalisis berbagai kondisi yang mendukung maupun menghambat strategi kepala sekolah dalam mengimplementasikan Program Sekolah Ramah Anak di SDN 1 Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang.

